

PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA

Annisa Wahyuningsih¹⁾, Abd. Hamid²⁾, Muhammad Afandi³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
hasyimannisa28@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id

³Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fandisupra666@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dalam upaya menstabilkan ketersediaan beras serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebagai kerangka analisis utama, serta mendasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar hukum. Ketahanan pangan dalam konteks ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Ketahanan Pangan, petani, dan masyarakat, observasi lapangan terhadap pelaksanaan program, serta dokumentasi data terkait ketersediaan dan distribusi beras. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong telah dilakukan melalui berbagai program, seperti peningkatan produksi lewat intensifikasi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, penyediaan benih unggul, serta penguatan sistem distribusi. Namun, ketersediaan beras masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kendala yang dihadapi mencakup faktor internal seperti perubahan iklim ekstrem, serangan hama dan penyakit tanaman, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Faktor eksternal yang turut memengaruhi adalah sistem distribusi yang belum optimal, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta fluktuasi harga pasar. Penelitian ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan sistem informasi dan monitoring yang efektif sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah ini.

Kata kunci: Manajemen, Ketahanan Pangan, Ketersediaan Beras

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the management of food security in Parigi Moutong Regency, with a focus on efforts to stabilize rice availability and identify the challenges encountered in the process. The research is grounded in the management functions theory by George R. Terry which encompasses planning, organizing, actuating, and controlling and refers to Law No. 18 of 2012 as the legal foundation for food security in Indonesia. Food security, as defined by this law, is a condition in which food needs are fulfilled for the nation down to individuals, reflected in the availability of sufficient, safe, diverse, nutritious, equitable, and affordable food. A qualitative descriptive approach was used in this study. Data were collected through in-depth interviews with key informants from the Food Security Office, farmers, and the community, as well as field observations and documentation related to rice availability and distribution. The data were then analyzed qualitatively to provide a comprehensive and in-depth overview of food security management in Parigi Moutong Regency. The results indicate that food security management in Parigi Moutong Regency has been implemented through various programs, such as increasing production via agricultural intensification, improving irrigation infrastructure, providing superior seeds, and strengthening distribution systems. However, rice availability still fluctuates from year to year. The challenges faced include internal factors such as extreme climate change, pest and disease outbreaks, and limitations in human resources and budget. External factors include suboptimal distribution systems, changes in consumption patterns, and fluctuating market prices. The study highlights the importance of improved coordination among stakeholders, capacity building for farmers, and the development of effective information and monitoring systems as strategic efforts to enhance food security in the region.

Keyword: Management, Food Resistance, Rice Availability

Submisi: 02-03-2025

Diterima: 02-03-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

Ketahanan pangan dibangun atas empat komponen utama yang saling terkait dan berpengaruh: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketersediaan pangan memastikan bahwa jumlah pangan yang diproduksi atau diimpor mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh populasi, dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber pangan selain beras, seperti jagung, umbi-umbian, dan sagu. Akses pangan menekankan pada kemampuan setiap individu untuk memperoleh pangan yang layak dan bernutrisi, baik secara ekonomi melalui daya beli yang memadai maupun secara fisik melalui infrastruktur dan distribusi yang efisien. Pemanfaatan pangan berfokus pada bagaimana individu mengolah dan mengonsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, yang dipengaruhi oleh pengetahuan gizi, praktik pemberian makan yang baik, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan. Terakhir, stabilitas pangan menjamin bahwa ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, bahkan dalam menghadapi guncangan ekonomi, perubahan iklim, atau krisis lainnya, melalui sistem pangan yang tangguh dan adaptif. Keempat komponen ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi (Wilkinson, 2015).

Beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari 90% penduduk di Indonesia. Konsumsi beras sangat tinggi, mencapai 93,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2022. Namun, konsumsi beras di Indonesia mulai menurun seiring dengan diversifikasi pola makan dan peningkatan konsumsi makanan pokok lainnya seperti tepung terigu. Pemerintah berupaya untuk melakukan diversifikasi pangan berbasis bahan pangan lokal, seperti ketela pohon, garut, sagu, sukun, ubi jalar, singkong, dan talas.

Perkembangan ketersediaan beras di Kabupaten Parigi Moutong dari Tahun 2019-2023 mengalami naik turun selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 ketersediaan beras mencapai 172.176 ton, pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 198.980 ton, kemudian pada tahun 2021 produksi beras mengalami penurunan sebanyak 135.271 ton, selanjutnya pada tahun 2022 ketersediaan beras mengalami kenaikan mencapai 166.507 ton, sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 180.407 ton. Berdasarkan data tersebut, ketersediaan beras tidak konsisten naik setiap tahun, melainkan berfluktuasi naik-turun. Ini menggambarkan ketidakstabilan yang cukup besar dalam pola produksi, dengan perbedaan tahun ke tahun dari periode lima tahun (2019-2023) tersebut kenaikan hanya berkisar lebih dari 25.000 ton sedangkan penurunan hampir 64.000 ton dengan 32% penurunan.

Ketidakstabilan ketersediaan beras di Parigi Moutong yang berasal dari dalam wilayah Parigi Moutong sendiri memiliki peran yang signifikan dalam memicu fluktuasi pasokan beras. Ketidakstabilan disebabkan oleh produksi beras yang tidak stabil akibat iklim dan hama penyakit. Perubahan iklim yang ekstrem, seperti musim hujan yang tidak teratur dan kekeringan, dapat mengganggu siklus tanam dan panen padi di Kabupaten Parigi Moutong. Serangan hama dan penyakit tanaman padi dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan serta kurangnya penerapan teknologi pertanian modern dapat menghambat peningkatan produktivitas. Selain itu, juga disebabkan oleh sistem distribusi yang kurang efektif seperti kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak, dapat menghambat distribusi beras dari produsen ke konsumen dan sistem pemasaran yang tidak efisien di Kabupaten Parigi Moutong, seperti rantai pasok yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak, dapat menyebabkan fluktuasi harga dan ketersediaan beras. Ketidakstabilan ini juga disebabkan oleh Perubahan pola konsumsi masyarakat kabupaten Parigi Moutong, seperti meningkatnya konsumsi beras premium atau produk olahan beras, dapat mempengaruhi permintaan terhadap beras lokal dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mendorong

petani untuk menjual sebagian besar hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mengurangi stok beras yang tersedia.

Hasil pengamatan Penulis, bahwa penyebab ketidakstabilan ketersediaan beras yaitu akibat masalah keterbatasan lahan pertanian karena lahan semakin berkurang, Permintaan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta perubahan gaya hidup. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan masalah mendasar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, mengingat sampai sekarang pemerintah Indonesia masih mengimpor beras sebagai pangan pokok. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong selaku salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengharuskan dinas terkait untuk mengatasi masalah tersebut guna terwujudnya ketahanan pangan yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian (beras) potensi sosial menuju kemandirian daerah karena mewujudkan ketersediaan merupakan tugas dinas tersebut.

Kabupaten Parigi Moutong diproyeksikan akan mencapai kedaulatan pangan pada tahun 2025 melalui target dengan 3 tahapan. Kedaulatan pangan tersebut dicapai melalui tiga tahapan yaitu Pemantapan ketahanan pangan, Pencapaian kemandirian pangan, dan Berdaulat pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dalam jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan.

Gambaran latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai langkah awal untuk memahami dan mengatasi ketahanan pangan tersebut diperlukan identifikasi terhadap tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong. Identifikasi ini bertujuan agar persebaran tingkat ketahanan pangan terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong yang termasuk dalam kategori rawan pangan dan tahan pangan dapat diketahui, sehingga dapat pula dicari caracara penyelesaiannya. Atas dasar itulah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Manajemen Ketahanan Pangan di Kabupaten Parigi Moutong”. Oleh karena itu, untuk menganalisis hal tersebut maka secara ilmiah, penelitian ini dilihat pada konsep fungsi manajemen. Menurut Terry (1993), bahwa fungsi manajemen yaitu sebagai suatu proses dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan dan dikelola atas dasar tindakan-tindakan yang meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka adapun rumusan masalah yang menjadi kajian penelitian ini yaitu bagaimana manajemen dinas ketahanan pangan Kabupaten Parigi Moutong dalam menstabilkan ketersediaan beras? Selain itu, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dalam Menstabilkan ketersediaan beras?

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dengan metode kualitatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif, yang akan mengungkapkan suatu gambaran penelitian disertai penjelasan secara obyektif. Definisi konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep teori fungsi manajemen oleh Terry (1993) yang meliputi aspek *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan).

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data-data yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan hasil pendapat dari informan terpilih. Sedangkan, sumber data yang digunakan, yaitu

terdiri atas 2 sumber meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri atas observasi atau pengamatan, dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang peneliti kumpulkan seperti dokumen, laporan, dan referensi yang berkaitan dengan ketahanan pangan sesuai lokasi penelitian yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dengan waktu penelitian selama 3 bulan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri atas observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pada bagian teknik wawancara, peneliti gunakan metode *purposive*. Metode *purposive* yaitu cara peneliti memilih informan atau orang yang dapat diwawancarai dan memberikan berbagai informasi serta paham tentang ketahanan pangan. Informan penelitian, meliputi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, dan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Parigi Moutong.

Instrumen dalam penelitian ini, yaitu pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan sesuai dengan konsep teori yang digunakan dan menjadi dasar pertanyaan kepada informan. Analisis data yang digunakan, yaitu model interaktif oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014) terdiri atas beberapa langkah analisis seperti data *collection*, data *relduction*, data *display*, data *conclusion drawing/verfyfication*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Parigi Moutong, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, memiliki sejarah pembentukan yang kaya dan kompleks, dimulai pada 8 Juni 1963 ketika Panitia Penuntut Pembentukan Kabupaten dibentuk oleh tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Upaya ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan pemerintahan lokal dan mempercepat pembangunan daerah. Pada 23 Desember 1965, Yayasan Pembangunan Wilayah Pantai Timur didirikan sebagai lembaga pengumpul dan pendana untuk mendukung pembentukan kabupaten ini, yang menunjukkan adanya dukungan masyarakat yang kuat untuk mewujudkan aspirasi tersebut.

Penelitian ini tentang ketahanan pangan, dan menjadi salah satu bidang yang sangat penting karena merupakan prasyarat fundamental bagi kehidupan manusia dan stabilitas suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau yaitu dasar bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.

Urusan ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong, menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong. Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan ketersediaan, distribusi, dan cadangan pangan yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kedudukan dan struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong telah di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 45 Tahun 2021 pada pasal 6 yaitu susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas kepala dinas beserta jajarannya, termasuk koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu,

Visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong fokus pada mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Visi utamanya adalah "Parigi Moutong Terdepan, Maju, Adil, Merata", yang mencakup peningkatan ketersediaan pangan, kualitas pangan, dan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas. Misi-misinya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dasar, dan pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga ketersediaan 11 komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak

goreng. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pemerintah menetapkan 11 komoditas sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, terutama saat terjadi keadaan darurat atau gejolak di pasar. Komoditas yang termasuk dalam CPP adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. CPP dikelola oleh Badan Pangan Nasional dan dimanfaatkan untuk intervensi pasar, bantuan pangan, serta penanggulangan bencana. Namun, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada komoditas-komoditas utama tersebut. Indonesia memiliki beragam tanaman pangan lokal yang berpotensi besar untuk mendukung diversifikasi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan. Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian mencatat bahwa terdapat setidaknya 77 spesies tanaman pangan lokal di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, lemak, protein, serta berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Beberapa contoh komoditas pangan lokal yang memiliki potensi besar antara lain ubi kayu/singkong, ubi jalar, pisang, jagung, sukun, ganyong, sagu, labu, umbi garut/irut/arus/jelarut, talas, suweg/iles-iles/porang, gadung, gembili, dan sorgum/cantel.

Pemanfaatan komoditas-komoditas ini dapat mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal. Selain itu, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal juga dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global. Meskipun memiliki potensi besar dalam produksi pangan, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan strategis. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor kedelai (80-90% impor), gula pasir (65-70% impor), bawang putih (90-95% impor), dan daging sapi (25-30% impor). Ketergantungan pada impor ini rentan terhadap risiko fluktuasi harga dan pasokan global, serta dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan daging sapi sebenarnya sudah mengalami surplus produksi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mencapai swasembada pangan, setidaknya untuk beberapa komoditas tertentu. Namun, produksi komoditas lain seperti gula dan kedelai masih belum mencukupi, sehingga diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing petani. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini meliputi peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, perbaikan infrastruktur pertanian dan rantai pasok, pengembangan sumber daya manusia petani, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan. Selain itu, diperlukan juga perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam dan berbasis sumber daya lokal.

Tabel 1.
Data Komoditas Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012-2018

No.	Komoditas	Rata-Rata Produksi (Ton)	Tahun
1	Padi	265.095,5	2012-2015
2	Jagung	19.463,25	2012-2015
3	Kedelai	1.375,5	2012-2015
4	Kacang Tanah	726,75	2012-2015
5	Kacang Hijau	150	2012-2015
6	Ubi Kayu	8.105,75	2012-2015
7	Ubi Jalar	377,75	2012-2015
8	Padi Sawah	1.2133	2014-2018
9	Padi Ladang	4.2615	2015-2018

(Sumber Data Sekunder: BPS Parimo, 2024)

Manajemen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dalam menstabilkan ketersediaan beras merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, mengingat fluktuasi ketersediaan beras yang terjadi dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Parigi Moutong mengalami variasi yang signifikan antara 2019 hingga 2023, dengan angka tertinggi mencapai 198.980 ton pada tahun 2020 dan terendah 135.271 ton pada tahun 2021. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan iklim, serangan hama, dan sistem distribusi yang tidak efisien. Dalam upaya menstabilkan ketersediaan beras, Dinas Ketahanan Pangan menerapkan beberapa strategi seperti peningkatan produksi pangan melalui penyuluhan kepada petani tentang teknik budidaya yang baik dan penggunaan varietas unggul, pengembangan infrastruktur pertanian untuk mendukung distribusi hasil pertanian, serta memperbaiki sistem distribusi dengan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi melalui program penyuluhan yang melibatkan petani lokal. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani dalam mengelola lahan pertanian mereka secara lebih efektif, termasuk penggunaan pupuk yang tepat dan teknik irigasi yang efisien. Selain itu, Dinas juga berupaya memperbaiki infrastruktur pertanian dengan membangun jalan tani dan sistem irigasi yang lebih baik, sehingga memudahkan akses petani ke pasar dan mengurangi kerugian pascapanen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hasil panen dapat meningkat secara signifikan dan ketersediaan beras di daerah ini dapat lebih stabil.

Namun, meskipun telah ada berbagai upaya, Dinas Ketahanan Pangan masih menghadapi beberapa kendala dalam menstabilkan ketersediaan beras. Salah satu kendala utama adalah perubahan iklim yang ekstrem dan serangan hama serta penyakit tanaman yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah juga menjadi tantangan besar dalam distribusi beras dari produsen ke konsumen. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program-program ketahanan pangan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini.

Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan pada tahun 2025, Kabupaten Parigi Moutong harus fokus pada penguatan manajemen ketahanan pangan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam program-program pertanian. Dinas Ketahanan Pangan perlu melakukan identifikasi terhadap tingkat ketahanan pangan di daerah ini untuk mengetahui persebaran kerawanan pangan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan ketersediaan beras dapat stabil dan ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong dapat terwujud secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Aspek *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dalam fungsi manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam konteks manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong. Dalam manajemen, perencanaan berfungsi sebagai langkah awal yang menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, serta menyusun strategi untuk mencapainya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ketahanan pangan, perlu melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, dapat terjaga dengan baik. Perencanaan ini mencakup identifikasi kebutuhan pangan masyarakat, analisis potensi produksi lokal, serta penentuan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam konteks ketahanan pangan, perencanaan

juga melibatkan pengembangan program-program yang dapat meningkatkan kapasitas petani dan memperbaiki infrastruktur pertanian. Dinas Ketahanan Pangan perlu merumuskan rencana aksi yang jelas untuk meningkatkan hasil pertanian melalui penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang efektif dan penggunaan varietas unggul. Selain itu, perencanaan harus mencakup pengembangan infrastruktur seperti jalan tani dan sistem irigasi untuk mendukung distribusi hasil pertanian, sehingga memudahkan akses petani ke pasar dan mengurangi kerugian pascapanen. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan ketersediaan beras di Kabupaten Parigi Moutong dapat lebih stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, secara proaktif mengelola ketahanan pangan melalui serangkaian program dan strategi terkoordinasi. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan ketersediaan beras dan memastikan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, yang didukung oleh analisis data produksi dan konsumsi, pertimbangan faktor iklim, serta keterlibatan aktif petani dalam proses perencanaan. Rencana strategis mencakup peningkatan infrastruktur distribusi dan pengembangan jaringan pemasaran untuk memastikan penyaluran beras yang efisien ke seluruh wilayah kabupaten. Meskipun terdapat tantangan seperti fluktuasi produksi, pemerintah terus memantau data produksi dan menyesuaikan rencana distribusi sesuai kebutuhan pasar, sementara harapan masyarakat, khususnya petani, adalah dukungan berkelanjutan melalui penyediaan bibit unggul dan pelatihan teknik pertanian modern, yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dapat disimpulkan bahwa perencanaan manajemen pangan di Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya mereka dalam meningkatkan ketersediaan beras dan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, serta melibatkan petani dalam proses perencanaan. Namun, masih terdapat tantangan terkait faktor eksternal seperti perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil pertanian. Rencana strategis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Distribusi menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur distribusi dan pengembangan jaringan pemasaran menjadi fokus utama untuk memastikan efisiensi dalam distribusi beras. Meskipun rencana telah disusun dengan baik, adaptasi terhadap fluktuasi produksi tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.

Dari sudut pandang masyarakat, harapan petani akan dukungan lebih dari pemerintah dalam penyediaan bibit unggul dan pelatihan teknik pertanian modern mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan petani. Sementara itu, penjual beras menekankan perlunya pemantauan permintaan dan tren konsumsi untuk menjaga ketersediaan beras agar tetap bersaing di pasar. Dengan demikian, meskipun rencana telah ada, implementasi di lapangan dan dukungan langsung kepada petani menjadi kunci untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang efektif.

2. Aspek *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam fungsi manajemen adalah salah satu aspek kunci yang berperan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen ketahanan pangan, pengorganisasian mencakup penataan sumber daya, baik manusia maupun material, untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem ketahanan pangan dapat berfungsi dengan baik. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ketahanan pangan, harus melakukan pengorganisasian yang tepat untuk mengatur berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Proses pengorganisasian dimulai dengan identifikasi tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan ketersediaan beras dan memastikan aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Setelah

tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur organisasi yang sesuai. Ini meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim, serta penentuan saluran komunikasi yang efektif. Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan, hal ini berarti mengorganisir tim penyuluh pertanian, staf administrasi, dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pengorganisasian juga mencakup pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program-program ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan perlu memastikan bahwa petani mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian modern, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Selain itu, penting untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, guna memperkuat jaringan distribusi pangan dan meningkatkan kapasitas produksi lokal. Dengan demikian, pengorganisasian yang baik akan membantu menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.

Kabupaten Parigi Moutong menerapkan pengorganisasian manajemen pangan yang terstruktur, melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta. Dinas Ketahanan Pangan memainkan peran sentral dengan tim khusus yang mengawasi setiap aspek pengelolaan, didukung oleh kemitraan dengan distributor lokal dan kelompok tani untuk memastikan distribusi yang terkoordinasi dan tepat waktu. Kelompok tani memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan tanam, sementara penjual beras menjaga pasokan melalui hubungan baik dengan distributor dan petani lokal, serta sistem pencatatan stok yang cermat. Infrastruktur yang kurang memadai menjadi tantangan, pengorganisasian yang efektif dan kerjasama antara berbagai pihak membantu meningkatkan efisiensi manajemen pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang dibentuk oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk petani, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang jelas dalam mendukung program ketahanan pangan, meskipun tantangan infrastruktur yang kurang memadai masih menjadi kendala dalam proses distribusi. Kepala Bidang Distribusi menekankan pentingnya kemitraan dengan distributor lokal dan kelompok tani untuk memastikan distribusi beras yang terkoordinasi dan tepat waktu. Namun, kondisi infrastruktur yang buruk seperti jalan rusak menghambat efisiensi distribusi dari produsen ke konsumen. Dari perspektif petani, keberadaan kelompok tani sangat membantu dalam berbagi informasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah mengenai kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa pengorganisasian di tingkat masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pertanian. Sementara itu, penjual beras mengelola pasokan dengan baik melalui hubungan yang baik dengan distributor dan petani lokal, serta menggunakan sistem pencatatan untuk memantau stok. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik di semua tingkatan dapat menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih responsif dan efektif.

3. Aspek *Actuating* (Pelaksanaan)

Pengarahan dalam fungsi manajemen adalah salah satu elemen kunci yang berfokus pada pengarahan dan motivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong, fungsi pengarahan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk petani, penyuluh, dan staf Dinas Ketahanan Pangan, bekerja secara sinergis dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya beras. Pengarahan mencakup komunikasi yang efektif, pengembangan kepemimpinan, dan

pemberian motivasi kepada anggota tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu aspek penting dari pengarahannya adalah komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan anggota tim. Dinas Ketahanan Pangan perlu menyampaikan visi, misi, dan tujuan program ketahanan pangan dengan baik agar semua pihak memahami peran mereka masing-masing dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, pengarahannya juga melibatkan pengembangan kepemimpinan yang efektif di antara penyuluh pertanian dan staf lainnya. Pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas dan inspiratif dapat memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen terhadap program-program yang ada. Dinas Ketahanan Pangan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan insentif bagi petani serta penyuluh untuk berpartisipasi aktif dalam program ketahanan pangan. Misalnya, penghargaan bagi petani yang berhasil meningkatkan hasil panen atau pelatihan bagi penyuluh untuk meningkatkan keterampilan mereka dapat menjadi cara efektif untuk memotivasi semua pihak terlibat. Dengan adanya motivasi yang kuat, diharapkan mencapai stabilitas ketersediaan beras di Kabupaten Parigi Moutong.

Kabupaten Parigi Moutong menerapkan pengarahannya manajemen pangan melalui berbagai strategi untuk memotivasi petani dan melibatkan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan insentif seperti subsidi pupuk dan pelatihan pertanian modern, serta membuka forum diskusi untuk mendengarkan aspirasi petani. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi dan penyuluhan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam program ketahanan pangan. Petani dimotivasi dengan pelatihan pemasaran dan informasi harga pasar, sementara masyarakat dilibatkan melalui program pasar tani. Motivasi petani didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, sementara penjual beras termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan pelayanan terbaik. Melalui kombinasi insentif, komunikasi, dan dukungan langsung, Parigi Moutong berupaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fungsi pengarahannya dalam manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong dinilai sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Ketahanan Pangan telah menerapkan berbagai program insentif untuk memotivasi petani, seperti subsidi pupuk dan pelatihan teknik pertanian modern, serta mengadakan forum diskusi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam hal komunikasi yang efektif agar semua pihak memahami pentingnya partisipasi dalam program ketahanan pangan. Kepala Bidang Distribusi menekankan upaya mereka dalam meningkatkan motivasi petani melalui pelatihan pemasaran hasil panen dan informasi harga pasar terkini. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses distribusi melalui program pasar tani, yang memungkinkan mereka membeli langsung dari petani dengan harga terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengarahannya yang baik dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Dari sudut pandang petani, dukungan pemerintah melalui pelatihan dan bantuan alat pertanian menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat bertani meskipun ada tantangan cuaca dan hama. Sementara itu, penjual beras berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan menyediakan beras berkualitas dan mendengarkan keluhan pelanggan, yang juga menjadi motivasi bagi stafnya untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, pengarahannya yang efektif di semua tingkatan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai stabilitas beras di Kabupaten Parigi Moutong.

4. Aspek *Controlling* (Pengawasan)

Pengendalian dalam fungsi manajemen adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konteks manajemen ketahanan

pangan di Kabupaten Parigi Moutong, pengendalian menjadi aspek krusial untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, tetap stabil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pengendalian ini mencakup pemantauan terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi produksi dan distribusi pangan, serta pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam pengendalian adalah pengukuran kinerja.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan. Indikator ini dapat mencakup jumlah produksi beras, tingkat distribusi, harga beras di pasar, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses pangan. Dengan adanya indikator yang terukur, Dinas dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah program-program yang dijalankan sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Selain itu, pengendalian juga melibatkan analisis data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dinas Ketahanan Pangan harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data terkait produksi pangan, kondisi cuaca, serangan hama, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan beras. Dengan informasi yang akurat dan terkini, Dinas dapat mengambil langkah-langkah preventif atau korektif untuk mengatasi potensi masalah sebelum menjadi lebih besar. Misalnya, jika terdeteksi adanya penurunan hasil panen akibat serangan hama, Dinas dapat segera melakukan intervensi dengan memberikan bantuan teknis kepada petani atau mendistribusikan pestisida yang diperlukan.

Kabupaten Parigi Moutong menjalankan pengendalian manajemen pangan melalui pemantauan rutin pelaksanaan program, pencatatan data hasil panen dan distribusi, serta tindakan korektif yang cepat jika terjadi masalah seperti penurunan hasil panen akibat hama atau cuaca ekstrem. Sistem pelaporan yang terbuka memungkinkan petani melaporkan masalah kepada penyuluh pertanian, sementara penjual beras berupaya mengatasi masalah pasokan dan keluhan pelanggan dengan mencari solusi alternatif dan memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan melalui Gerakan Pangan Murah dan kolaborasi dengan Bulog, serta melakukan pengawasan distribusi bahan pangan. Dengan demikian, Parigi Moutong berupaya menjaga ketahanan pangan dan kepuasan masyarakat melalui pengendalian manajemen pangan yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam manajemen ketahanan pangan di Kabupaten Parigi Moutong dianggap sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, tetap stabil. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan pelaksanaan program melalui survei dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Jika terdapat masalah seperti penurunan hasil panen akibat hama atau cuaca ekstrem, tindakan korektif segera diambil dengan memberikan bantuan teknis kepada petani atau merevisi rencana distribusi. Kepala Bidang Distribusi menegaskan bahwa mereka juga melakukan investigasi terhadap keluhan masyarakat mengenai distribusi beras untuk menemukan penyebabnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secepat mungkin. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam menangani masalah yang muncul. Dari perspektif petani, sistem pelaporan masalah yang terbuka sangat membantu mereka dalam melaporkan isu seperti hama atau hasil panen rendah kepada penyuluh pertanian untuk mendapatkan solusi cepat dari pemerintah. Petani juga mencari cara alternatif untuk menjual hasil panen mereka jika tidak sesuai harapan, sambil tetap berkonsultasi dengan kelompok tani mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu, penjual beras mengelola pasokan dengan cepat menghubungi pemasok jika terjadi masalah dalam pengiriman dan selalu siap mendengarkan keluhan pelanggan. Dengan pendekatan ini, mereka dapat memberikan solusi cepat agar pelanggan merasa puas. Secara keseluruhan, pengendalian yang efektif di semua tingkatan

membantu menjaga stabilitas ketersediaan beras dan meningkatkan kepuasan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.

SIMPULAN

Manajemen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dalam menstabilkan ketersediaan beras dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Dari sisi perencanaan, Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun rencana strategis untuk meningkatkan ketersediaan beras melalui program intensifikasi pertanian, penyuluhan teknik budidaya kepada petani, serta penyediaan benih unggul. Perencanaan ini juga melibatkan identifikasi kebutuhan pangan masyarakat, analisis potensi produksi lokal, serta pengembangan infrastruktur pertanian seperti jalan tani dan irigasi guna mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian dan meminimalisir kerugian pascapanen. Namun, perencanaan yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fluktuasi produksi yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan serangan hama penyakit, sehingga ketersediaan beras di daerah ini masih mengalami ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari aspek pengorganisasian, Dinas Ketahanan Pangan telah membentuk struktur organisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok tani, distributor, dan lembaga non-pemerintah, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dalam mendukung program ketahanan pangan. Pengorganisasian ini juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pembangunan sistem komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Meskipun demikian, koordinasi dan optimalisasi peran kelompok tani masih perlu diperkuat agar distribusi beras dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di wilayah yang infrastruktur pendukungnya masih kurang memadai. Dengan demikian, meskipun upaya perencanaan dan pengorganisasian sudah berjalan, masih diperlukan peningkatan dalam implementasi di lapangan agar tujuan stabilitas ketersediaan beras dapat tercapai secara optima.

Kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong dalam menstabilkan ketersediaan beras dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan program-program ketahanan pangan yang belum berjalan secara optimal. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan masih menemui hambatan, sehingga produktivitas pertanian belum maksimal. Tidak jarang pula terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan seperti subsidi benih dan pupuk, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas petani dan ketersediaan beras di tingkat lokal. Sementara itu, dari sisi eksternal, Dinas Ketahanan Pangan dihadapkan pada tantangan perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan pola musim tanam menjadi tidak menentu dan meningkatkan risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir. Serangan hama dan penyakit tanaman juga sering kali menurunkan hasil panen secara signifikan. Selain itu, sistem distribusi beras di Kabupaten Parigi Moutong masih belum berjalan optimal karena infrastruktur jalan yang rusak dan rantai pasok yang panjang, sehingga distribusi beras dari produsen ke konsumen menjadi terhambat. Perubahan pola konsumsi masyarakat, seperti meningkatnya permintaan terhadap beras premium, turut mempengaruhi permintaan beras lokal dan menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras. Tidak hanya itu, fluktuasi harga pasar yang tidak stabil semakin memperberat upaya pemerintah daerah dalam menstabilkan ketersediaan dan harga beras di wilayah ini. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif agar ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras, dapat terjaga secara berkelanjutan di Kabupaten

Parigi Moutong.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ketahanan pangan, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian, serta menyesuaikan strategi agar lebih responsif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar; penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga penting agar setiap program berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi petani dan masyarakat, di samping itu perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Bulog, kelompok tani, dan sektor swasta untuk memperkuat distribusi dan menjamin ketersediaan beras di seluruh wilayah, serta mendorong pembentukan kelompok tani dan pelatihan berkelanjutan di tingkat desa agar petani mampu mengadopsi teknologi pertanian modern dan mengelola usaha tani secara mandiri, sekaligus memperkuat diversifikasi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber pangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan
- Peraturan Badan Pangan Nasional No.15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen
- Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 45 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/MDAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN)
- Terry, George R. 1993. Prinsip-Prinsip Manajemen, Alih Bahasa: Smith D. F. M, J., Edisi, Cet. 5. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Perlu diperhatikan bahwa UU ini mungkin sudah dicabut atau diganti dengan UU yang lebih baru, seperti UU No. 18 Tahun 2012)
- Wilkinson, J. 2015. *Food Security and The Global Agrifood System: Ethical Issues In Historical And Sociological Perspective*. Journal Global Food Security. Vol. 7, No. 1, Page 9-14. ISSN: 22119124. DOI: 10.1016/j.gfs.2015.12.001

TENTANG PENULIS

Saya seorang mahasiswi di Program Studi Administrasi Publik, Fisip Untad sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Riwayat pendidikan yaitu tamat SD tahun 2014 di SDN Bambalemo , tamat SMP tahun 2017 di SMP Negeri 2 Parigi, dan tamat SMA tahun 2020 di MA Al Khairaat Siniu, serta terdaftar sebagai Mahasiswa Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Pada tahun 2021 dan selesai di tahun 2025. Berikut identitas singkat penulis, yaitu sebagai berikut:

Nama : Annisa Wahyuningsih
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 10 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Bambalemo
Email : hasyimannisa28@gmail.com